

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju keadaan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, atau dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 1969 pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia mulai melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama untuk melakukan kegiatan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Namun, pembangunan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dilihat dari seberapa besar kemampuan pertumbuhan tersebut sehingga dapat menjawab masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan inflasi.

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan, ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, pemerintah memerlukan modal yang besar, Akan tetapi pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan modal tersebut. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan ekonomi adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan melalui

kegiatan investasi. baik yang bersumber dari dalam atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (BKPM, dalam Adithya: 2007). Investasi dalam negeri juga merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional, selain konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Investasi pada hakikatnya yaitu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, maka pemerintah berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Upaya yang diciptakan pemerintah dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi salah satunya menerapkan berbagai aturan mengenai investasi, diantaranya adalah undang-undang No 1 tahun 1967, No 11 tahun 1970, tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No 6 tahun 1968, No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dimaksudkan adanya UU No 11 tahun 1970 selain membawa dana masuk, juga membawa serta teknologi produksi, manajemen dan akses ke pasar dunia. Kemudian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka pada tahun 1984 dilakukan debirokrasi dan deregulasi. Melalui usaha ini kinerja investasi menunjukkan perkembangan yang positif (Sastrowardoyo, 1994). Pada tahun 1994, pemerintah memperbolehkan investasi dikuasai oleh 95% PMA. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki iklim usaha di dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat menarik untuk melakukan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pelaksanaan investasi merupakan salah satu bentuk nyata dalam pembangunan nasional.

Sukirno (2012) menyatakan bahwa investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal, atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal, dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dalam suatu daerah ini diharapkan mampu terus memacu pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect*, yaitu kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan membantu menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Meningkatnya investasi ternyata menimbulkan kompensasi bagi faktor ekonomi yang lain. Salah satunya ikut mempengaruhi tingginya laju inflasi. Solusi yang paling tepat untuk menanggulangi tingginya inflasi yaitu dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Namun dengan terjadinya tingginya suku bunga berdampak dengan mahalanya *cost of capital*, sehingga tingkat investasi menjadi turun (Prasetyantono, 1995). Pada beberapa negara berkembang, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran untuk investasi pada umumnya inelastik terhadap tingkat suku bunga. Fakta ini menunjukkan bahwa biaya untuk membayar suku bunga relatif kecil terhadap total biaya untuk investasi di negara yang sedang berkembang (Chatak, 1981). Kenyataan ini lebih disebabkan oleh faktor non ekonomi yang mempengaruhi ketidakefisienan suku bunga terhadap investasi.

Hubungan inflasi terhadap investasi yaitu negatif. Tingginya inflasi mengakibatkan kenaikan harga pada hampir seluruh barang yang ada di suatu negara. Kenaikan harga barang tersebut mengurungkan minat investor untuk

berinvestasi di dalam negeri, karena investor merasa lebih terjamin untuk berinvestasi pada saat tingkat inflasi cenderung rendah dan stabil.

Kota Kupang adalah sebuah Kota dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota Kupang merupakan kota yang terbesar di Pulau Timor, Kota Kupang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di "Kota Kupang" adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 441.565 jiwa (2020). Kota ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan.

Apabila dilihat dari potensi yang dimiliki, Kota Kupang memiliki peluang yang sangat besar untuk aktivitas investasi. Kota kupang memiliki letak geografi yang strategis, Serta memiliki sumber daya manusia yang cukup tersedia dan sumber daya alam yang cukup melimpah seperti berupa bahan mentah dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang dapat dipergunakan untuk membangun sektor industri. Meskipun memiliki potensi yang unggul, namun daya tarik investor untuk berinvestasi di Kota Kupang masih dinilai kurang. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih minimnya usaha pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi. Mengacu pada asumsi makro, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Kota kupang yaitu, inflasi dan PDRB. Berikut ini merupakan data investasi, inflasi, dan PDRB Kota Kupang:

Tabel 1.1
Data Jumlah Investasi, Inflasi, dan PDRB Kota Kupang Tahun
2015- 2020

No	Tahun	Inflasi (%)	PDRB (%)	Investasi (%)
1	2016	0,36	8,27	5,87
2	2017	0,31	8,31	5,81
3	2018	0,50	8,35	5,80
4	2019	0,39	8,38	5,86
5	2020	0,36	8,37	5,75

Sumber : BPS, Kota Kupang dalam Angka, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah investasi di Kota Kupang setiap tahunnya berbeda atau terjadi naik turun. Ini disebabkan karna beberapa faktor, yaitu Inflasi dan PDRB. Kenaikan Inflasi dan PDRB akan berdampak pada investasi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Markus Hutahaean (2008), dengan Judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel inflasi, PDRB dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi PMDN di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap investasi di Kota Kupang. Beberapa faktor tersebut yaitu Inflasi dan PDRB. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih mendalam mengenai **“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DI KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi dan PDRB Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Investasi di Kota Kupang ?
2. Apakah Inflasi dan PDRB Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Investasi di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui apakah Inflasi dan PDRB Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Investasi di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui apakah Inflasi dan PDRB Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Investasi di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan dikemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai alat dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan khususnya Tentang Investasi.